

RENCANA KERJA

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Лп. Raden Panji No. 158 Telp. (0341) 392024 Fax. (0341) 392024 e-mail: sekda@malangkab.go.id website: http://www.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah.

Demikian, semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ini.

> KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

> > Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T

Pembina Tingkat I NIP. 19661218 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PE	NGAN'	rar	i
DAFTAR	ISI	***************************************	ii
DAFTAR	TABEI		iii
BAB I	PEN	DAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	7
	1.3	Maksud dan Tujuan	11
	1.4	Sistematika Penyusunan	12
BAB II	HAS	IL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ANGKAT DAERAH TAHUN 2019	
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	13
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda	25
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda	30
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah	
		Daerah	31
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	
		Masyarakat	38
BAB III	TUJ	UAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
	3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi	
		Perekonomian Setda	42
	3.3	Program dan Kegiatan	42
BAB IV	REN	CANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V	PEN	UTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2020 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah 20 Kabupaten Malang
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi
	Perekonomian Setda Kab. Malang 26
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Hasil Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang
Tabel 4.2	Rencana Kerja dan Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Bagian Administrasi 52 Perekonomian Tahun 2021



BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 203 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor Tahun 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
- 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
- Bupati adalah Bupati Malang.
- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
- Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
- 11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

(3) Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 14 Desember 2020

> > BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal 14 Desember

2020

SEKRETARIS DADRAH KABUPATEN MALANG,

SEKRETARIAT DAERAH

WALYU HIDAYAT

Berita Derah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 182 Seri D LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 203 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sckretariat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Proses penyusunan Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mulai dilaksanakan setelah menindaklanjuti Phonogram Bupati Malang Nomor: 005/1032/35.07.032/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan Surat Edaran Bupati Nomor: 050/741/35.07.202/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, kemudian Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sebelum dilakukan asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah memberikan pengarahan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang terkait mekanisme dan sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setelah mendapat arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 yang berpedoman pada Rencana Strategis, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun berjalan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. Setelah disusun, kemudian dilakukan asistensi Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya pada ketentuan Pasal 131. serta Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang 050/2603/35.07.202/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah yaitu hasil Usulan Musrenbang yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, penyelarasan indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Perangkat Daerah, Rancangan Rencana Kerja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, sedangkan pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyusunan serta verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang sesuai surat Kepala Daerah Kabupaten Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Mei 2020 Nomor: 005/3002/35.07.202/2020 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2021 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 9 Juni 2020 Nomor: 005/3634/35.07.202/2020 perihal Penyesuaian Pagu Indikatif, Target Program/Kegiatan Dalam Rangka Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan proses penyusunan yang mengacu kepada program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Adapun hal-hal penting yang menjadi perhatian dan penekanan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mungkin mempengaruhi pencapaian program/kegiatan di tahun 2021, dengan tetap mengoptimalkan pencapaian outcome dari program-program yang ada, mengacu pada sasaran tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta Prioritas Provinsi dan Nasional;
- Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- Penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 di tingkat kecamatan;
- d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

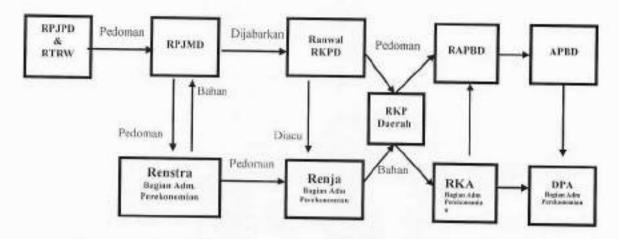
Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021, dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung misi kedua yaitu "memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi", dan sasaran ke-3 dari misi ke-2 yaitu "meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik".

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

- 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
- Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme
 Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang
 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
- Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
- Keputusan Bupati Malang Nomor: 188,45/934/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188,45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/527/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah:

- Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
- Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
 - 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pada Tahun 2019 Bagian Administrasi melaksanakan 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian kinerja/ program kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019 dapat tercapai 100%. Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki Program Prioritas yaitu Program Administrasi Bidang Perekonomian. Dari target dan realisasi masing-masing sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa tercapai 100% sehingga dapat dikatakan berhasil.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Perekonomian meliputi:

- Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro Kreatif;
- Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan;
- Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD.

Masing-masing monitoring dan evaluasi di bidang perekonomian terdiri dari 2 (dua) laporan, yaitu Laporan Semester I dan Semester II, sehingga secara keseluruhan terdapat 6 (enam) laporan.

Adapun Tabel 2.1 merupakan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2020. Secara umum, program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang melakukan penyesuaian atas dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/934/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Hal ini merupakan implikasi dari adanya beberapa kali penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, menjadikan perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2020 dapat terukur maksimal karena capaian kinerjanya dapat diakumulasi keseluruhan dalam periode Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 serta adanya beberapa penyesuaian nomenklatur program/kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, ada beberapa pergeseran kegiatan dari salah satu program ke program lainnya sehingga harus disesuaikan kembali, juga ada beberapa program/kegiatan yang di tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi (dihapus).

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa pada dasarnya seluruh program/kegiatan telah terealisasi sesuai target, dengan beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi program/kegiatan baru Tahun 2018 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Program Administrasi Bidang Perekonomian dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- b. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai juga merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai kebutuhan adminisitrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang memadai, diantaranya:
 - a. Program pelayanan Administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan barang cetakan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyediaan logistik kantor;
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman telah melebihi target kinerja dari 192 HOK menjadi 482 HOK atau sebesar 251% melebihi analisis kebutuhan;
 - Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah telah melebihi target kinerja dari 200 HOK menjadi 226 HOK atau sebesar 113% keluaran melebihi analisis target hasil/keluaran;
 - c. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah telah melebihi target kinerja dari 200 HOK menjadi 553 HOK atau sebesar 276,5% keluaran melebihi analisis target hasil/keluaran.
- Realisasi program/kegiatan yang masih kurang dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat masih kurang mencapai target yang direncanakan, yaitu dari target 600 buah surat, hanya 71 buah surat yang terealisasi atau 11,83%, hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk penyediaan jasa surat menyurat disesuaikan dengan jumlah surat yang terkirim menggunakan jasa layanan pengiriman surat (PT. Pos Indonesia dan sejenisnya);
- b. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dari 360 OB hanya mencapai 199 OB atau sebesar 55,23%, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan target keluaran pada tahuntahun tertentu, dimana ada tahun yang menghitung target berdasarkan jumlah orang perbulan pada 12 bulan, da nada yang menggunakan jumlah orang pada 12 bulan;
- c. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor masih kurang mencapai target, yaitu dari 60 OB hanya tercapai 36 OB atau sebesar 60%, karena adanya perubahan satuan pada tahun 2018, sehingga capaian kinerja hanya dihitung mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 (tahun sebelum 2018 tidak masuk perhitungan);
- d. Program pelayanan administrasi pekantoran pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor masih kurang mencapai target, dari 60 jenis hanya mencapai 42 jenis atau sebesar 70%, karena beberapa ATK yang direncanakan untuk diperbarui atau ditambah, tidak dilaksanakan karena ATK yang tersedia masih dapat berfungsi dengan baik;
- e. Program peningkatan disiplin aparatur pada kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang semula ditargetkan 78 stel tercapai 46 stel atau 58,97% berdasarkan kebutuhan personel;
- f. Program peningkatan disiplin aparatur pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang semula ditargetkan 78 stel tercapai 29 stel atau sebesar 37,18% dengan realisasi belanja yang tidak setiap tahun dilaksanakan;
- g. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang semula ditargetkan 78 orang tercapai 42 orang yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan atau sebesar 53,85% berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya dalam Bagian Administrasi Perekonomian.

- Adapun ada beberapa program/kegiatan dipandang kurang relevan untuk tidak dilaksanakan (dihapus) oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang mulai tahun 2018-2019 dikarenakan adanya penyesuaian dalam dokumen Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang disahkan melalui Bupati Malang Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/934/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga di dalamnya terdapat beberapa penyesuaian/perubahan baik nomenklatur program/kegiatan, target kinerja maupun volume/besaran kinerjanya tetapi tidak mengubah pencapaian sasaran akhir, terdapat beberapa pergeseran kegiatan dari salah satu program ke program lainnya sehingga harus disesuaikan kembali, juga ada beberapa program/kegiatan yang di tahun 2018-2019 sudah tidak dilaksanakan lagi (dihapus), diantaranya:
 - a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada kegiatan penyusunan laporan keuangan semsteran dan kegiatan penyusunan pelaporan akhir tahun;
 - b. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif pada kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah serta kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan memengah;
 - Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan pada kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;

- e. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah;
- 6. Terdapat 1 program mandatori yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan perubahan atas peraturan perundangundangan yang mendasari yaitu dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau dengan kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai menjadi Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundangundangan di Bidang Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program/kegiatan serta anggaran di tahun 2019 antara lain:

- Terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan tugas-tugas kedinasan, yaitu dalam rangka penyelenggaraan monitoring Koperasi & Usaha Mikro, Perindustrian & Perdagangan serta Sarana Perekonomian dan BUMD;
- Terbatasnya pengetahuan aparatur terhadap kondisi isu-isu perekonomian yang dapat berpengaruh di Kabupaten Malang;
- Dalam melaksanakan pelayanan, Bagian Administrasi Perekonomian Setda melakukan fungsi koordinasi baik dari instansi internal dan eksternal;
- Terbatasnya database di bidang perekonomian, terutama terkait potensi ekonomi daerah;
- Pelayanan berupa pemantauan/monitoring bahan pangan dan komoditas Strategis yang dilaksanakan mencakup wilayah yang luas dan memiliki jenis yang beragam;
- Pelayanan berupa pemantauan/monitoring Koperasi dan Usaha Mikro yang dilaksanakan mencakup wilayah yang luas dan komoditas berbasis masyarakat yang beragam.

Mengatasi beberapa kendala yang dihadapi tersebut, maka terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian sehingga pencapaian kinerja program/kegiatan maupun anggaran Tahun 2019 tetap dapat dicapai optimal adalah sebagai berikut:

- Mendayagunakan sumberdaya manusia dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna terwujudnya pelayanan yang optimal serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah;
- 3. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang tersedia;
- Melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal guna otpmalisasi pencapaian tugas pokok dan fungsi;
- Clustering dan pemetaan untuk mempermudah pelaksnaan monitoring dan evaluasi sektor ekonomi yang mencakup wilayah wilayah yang luas dan komoditas berbasis masyarakat yang beragam.

Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda. dan perkiraan pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2020 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Tahun	Target	dan Realisa Tahun 201		Target Renja Tahun 2020	Perkiraan Capaian s.d. Tahun 2020		Ket.
No.			Program Renstra 2016-2021		Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	ALCC!
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar (buah)	600 Buah	4 Buah	15 Buah	41 Buah	273,33%	4 Buah	49 Buah	8,16%	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak (orang)	360 OB	17 OB	180 OB	168 OB	93,33%	14 0B	199 OB	55,27%	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan dan sarana kebersihan kantor (OB)	60 OB	12 OB	12 OB	12 OB	100%	12 0B	36 OB	60%	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor (Jenis)	60 Jenis	42 Jenis	42 Jenis	42 Jenis	100%	30 Jenis	114 Jenis	190%	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	6 Jenis	7 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	23 Jenis	383,33%	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik (Jenis)	6 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	6 Jenis	17 Jenis	283,33%	
7		Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6 Jenis	300%	

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan (HOK)	192 HOK	132 HOK	168 HOK	158 HOK	94,05%	192 HOK	482 HOK	251,04%
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah (HOK)	200 HOK	9 HOK	100 HOK	17 HOK	17%	3 НОК	29 HOK	14,5%
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi (HOK)	200 HOK	142 HOK	200 HOK	211 HOK	105.5%	191 HOK	544 HOK	272%
11	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	234 HOK	192 HOK	7 HOK	7 HOK	100%	6 Jenis	205 Jenis	87,61%
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	5 Jenis	4 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	6 Jenis	120%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	7 Jenis	233,33%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 & 2 yang dipelihara rutin/ berkala (unit)	26 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	8 Unit	16 Unit	61,54%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala (jenis)	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	7 Jenis	233,33%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/pelihara (jenis)	3 Jenis	11 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	3 Jenis	18 Jenis	600%
6	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	0 Unit	3 Unit	100%
ш	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah paksian dinas dan perlengkapan yang dibeli (stel)	78 Stel	16 Stel	15 Stel	15 Stel	100%	15 Stel	46 Stel	58,97%
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel)	78 Stel	0 Stel	14 Stel	14 Stel	100%	15 Stel	29 Stel	37,18%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
į,	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	78 Orang	12 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	42 Orang	53,85%	
v	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kincrja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	0	0	0	0	100%	100%	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumiah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun (Laporan)	1	1	0	0	0	0	1	100%	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Laporan)	2	2	0	0	0	0	2	100%	
VI	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Prosentase jumlah pelaporan Keikutsertaan dalam pameran berskala lokal	100%	100%	0	0	0	o	100%	100%	
1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan pelaksanaan, perencanaan, koordinasi & pengembangan usaha kecil menengah (Laporan)	2	2	0	0	0	0	2	100%	
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan hasil evaluasi dan monitoring pelaku usaha kecil dan mikro (Laporan)	2	2	0	0	0	0	2	100%	
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase promosi potensi ekonomi daerah	100%	100%	o	0	0	o	100%	100%	
1	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah data spasial yang dapat disediakan (data)	1	1	0	0	0	0	1	100%	
		Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional (Laporan)	1	1	0	0	0	0	ī	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
III.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	100%	100%	0	o	0	o	o	-
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg (Laporan)	2	2	0	0	0	0	0	
x.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	100%	0	o	0	o	o	-
1	Peningkatan Manajemen Investasi daerah	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan menitoring, evaluasi dan pelaporan (Laporan)	12	12	0	0	0	0	0	-
x	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	Prosentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang- undangan di bidang cukal	100%	o	o	0	0	o	100%	100%
1	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah pelaporan capaian info ketentuan perundang-undangan di bidang cukai (Laporan)	1	0	0	0	0	0	1	100%
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase pelaporan pendistribusian Raskin	100%	0	0	0	o	0	o	100%
1	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin (Laporan)	2	2	0	0	0	0	2	100%
	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan perundang- undangan di Bidang Cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di Bidang Cukai (Laporan)	8	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	75%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
хш	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaporan Monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro (Laporan)	8	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	75%
2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan Monitoring dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan (Laporan)	8	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	75%
3	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD (Laporan)	8	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	75%

Keterangan tabel 2.1
*) Bukan merupakan hasil penjumlahan;
**| Merupakan hasil perhitungan rata-rata, karena indikator kinerja memiliki perbedaan satuan volume sehingga tidak dapat diakumulasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Adapun Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah di tahun 2019 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang perekonomian yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian yang terdiri dari Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Sektor Usaha Mikro serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut;

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang

9000	02///22/24/04/12	SPM/ Standar	IKK/		Target Rer	istra SKPD		R	ealisasi Capa	ian	Proyeksi	Catatan
No.	Indikator	Nasional	IKU	Tahun 2019	Tahun 2 020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	-4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Program dan Kegiatan Bagia	n Administrasi	Perekono	mian Sekret	ariat Daerah							
1.	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	12	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	25	
1.	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	-	7	120 buah	120 buah	120 buah		41 buah	49 buah	120 buah		
2.	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan	2	-	72 OB	72 OB	72 OB	-	168 OB	199 OB	72 OB		
3.	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor	*	-	12 OB	12 OB	12 OB	-	12 OB	36 OB	60 OB	*:	
4.	Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor	-	33	60 jenis	60 jenis	60 jenis		42 jenis	114 jenis	60 jenis	23	
Б.	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		*	6 jenis	6 jenis	6 jenis		8 jenis	23 jenis	6 jenis	-	
6.	Jumiah paket pengadaan komponen/instalasi listrik		72.	6 jenis	6 jenis	6 jenis	- Ta	5 jenis	17 jenis	6 jenis		
7.	Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli			2 jenis	2 jenis	2 jenis		2 jenis	6 jenis	2 jenis	ta	
8.	Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	=	8	192 HOK	192 HOK	192 HOK		158 HOK	482 HOR	192 HOK	£3.	
9.	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah			200 HOK	200 HOK	200 HOK		17 HOK	29 HOK	200 HOK	5.	
10	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi	6	2	200 HOK	200 НОК	200 HOK		211 HOK	544 HOK	234 HOK		
11	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	=	4	234 HOK	234 НОК	234 HOK		7 НОК	205 HOK	234 HOK	-	

No.	7. 475	SPM/ Standar	IKK/		Target Re	nstra SKPD		R	ealisasi Capa	ian	Proyeksi	Catatan Analisis
no.	Indikator	Nasional	IKU	Tahun 2019	Tahun 2 020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Analisis
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Persentase Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik		0.7/4	100%	100%	100%		100%	100%	100%		
12,	Jumlah paket penyediaan peralatan gedung kantor		100	5 jenis	5 jenis	5 jenis	-	1 jenis	6 jenis	5 jenis	- 6	
13.	Jumlah paket pemeliharaan gedung/kantor	3		3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	2 jenis	7 jenis	3 jenis	-	
14,	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2	12.5	6 unit	6 unit	6 unit	2±2	4 unit	16 unit	26 unit	* .	
15.	Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor		-	3 jenis	3 jenis	3 jenis		2 jenis	7 jenis	3 jenis		
16.	Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung/kantor	2	*	-	-		-	4 Jenis	18 jenis	3 jenis	3	
17.	Jumlah paket kendaraan dinas/operasional roda 2	2	-	5		-	54.7	3 jenis	3 jenis	+		
3.	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait		4	100%	100%	100%		100%	100%	100%	-	
18.	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli		-	16 Stel	16 stel	16 stel		15 Stel	46 Stel	78 Stel		
19.	Jumlah penyediaan pakaian dinas	-		16 Stel	16 stel	16 stel	-	14 stel	29 stel	78 stel	-	
4.	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	+		100%	100%	100%		100%	100%	100%		
20.	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		1.5	16 orang	16 orang	16 orang	-	15 org	42 org	78 org	- 2	
5.	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel		-				12	9	-			
21.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-4	8			-	- 2	-	-	-	
22.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	+	4	2:	-		- 0		2	3	-	
6.	Persentase jumlah pelaporan kikutsertaan dalam pameran berskala local					-				+		

***		SPM/ Standar	IKK/		Target Rer	stra SKPD		R	ealisasi Capa	ian	Proyeksi	Catatan Analisis
No.	Indikator	Nasional	IKU	Tahun 2019	Tahun 2 020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anatists
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	Jumlah pelaporan pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah				2						-	Merupakan kegiatan bar sebagai akrb terbentukny sub- bagian koperasi dan UKM
24.	Jumlah pelaporan/evaluasi fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah		15			7.2	100			(#)		
7.	Persentase promosi potensi ekonomi daerah	-		5			24					
25.	Jumlah data spasial yang dapat disediakan		14	-	-			-		-	-	
26.	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	*		*	-	-	-		-	-	-	
8.	Persentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg			-	+	-		-		*	2	
27.	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	- 2		8	-		-	-			-	
9.	Persentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	4	-	-			4	-		25	
28.	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	149	-	2	-	+	-	-	2	5	150	
10.	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai		2	21	3	-	2	5	-	75		
29.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	+	*					2			-	
11.	Persentase materi yang disampaikan dalam rangka peningkatan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk	24				-	-			ŧ	.*	
30.	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk	*	-	-				-		-	4	

W	5-413-4	SPM/ Standar	IKK/		Target Re	nstra SKPD		R	ealisasi Cap	aian	Proyeksi	Catatan Analisis
No.	Indikator	Nasional	IKU	Tahun 2019	Tahun 2 020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	3,000,000
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	pencapaian keluarga sadar gizi											
12.	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	2	12	-					878	-	-	
31.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-		-	15	14	30	- 65		3		
13.	Prosentase Pelaporan pendistribusian Raskin			-		-				2		
32.	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	-	12		-			+,				
14.	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		1/2	100%	100%	100%		100%	100%	100%		
33.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	3.7	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	3	
15.	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian		Sq.	100%	100%	100%	- 15	100%	100%	100%		
34.	Pelaporan monitoring Koperasi dan Sektor Usaha Mikro		2	2 Iaporan	2 laporan	2 laporan	-	2 laporan	6 Laporan	2 laporan	-	
35.	Pelaporan monitoring Sektor Perindustrian dan Perdangangan		-5	2 Laporan	2 Iaporan	2 laporan	9	2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	\$	
36.	Pelaporan monitoring Pemanfaatan Sarana Perekonomian & BUMD	2		2 Laporan	2 Iaporan	2 laporan		2 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	-	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Merujuk pada ketentuan, Bagian Administrasi Perekonomian bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun peran yang dimiliki adalah untuk menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan penyajian pelaporan dan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau stakeholder terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan, maka koordinasi dengan PD dan stakeholder terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yang akan dan diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2 "Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi" pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Sektor Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dokumen perencanaan Bagian Administrasi Perekonomian ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan reviu terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah maupun analisis kebutuhan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda, Kabupaten Malang Tahun 2021, terdapat beberapa perbedaan/pergeseran. Hal ini disebabkan salah satunya adanya analisis kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga maupun akibat/implilkasi dari terjadinya Pandemi COVID-19 dilakukan sehingga perlu beberapa penyesuaian/perubahan/pergeseran besaran baik target kinerja maupun pagu indikatif anggarannya pada beberapa kegiatan. namun demikian Berdasarkan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dengan hasil bahwa beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti

Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, serta Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian antara lain monitoring koperasi dan sektor usaha mikro, monitoring sektor perindustrian dan perdagangan serta monitoring pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD.

Uraian hasil *review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

	URUSAN	INDIKATOR	R	ANCANGAN	AWAL RKPD			INDIKATOR		HASIL ANAL	ISIS KEBUTUHAN		
KODE	PEMERINTAHA N DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIA N KINERJ A	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DAN A	PROGRAM / KEGIATAN	KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA	CAT. TAN PEN TING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2.331.143.777,	100					1.496.162.856,00		
4	FUNGSI PEN PEMERINTAH		RUSAN		2.331.143.777, 00						1.496.162.856,00		
4.406	FUNGSI LAIN	INYA			2.331.143.777, 00						1.496.162.856,00		
4.406.41	BAGIAN ADN	IINISTRASI	PEREKONO	MIAN	2.331.143.777,						1.496.162.856,00		
4.406.41.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	267.470.380,00		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Persentan Operasional Perkantoran (%)		100%	395.470.380,00		
4.406.41.01.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kab. Malang	120 buah	. 1.159.567,00	APBD Kabu paten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kab. Malang	15 buah	1,159,567,00	APBD Kabupa ten	
4,406,41,01,0 2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab, Malang	15 Ob	194,604,000,00	APBD Kabu paten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	15 Ob	233.604.000,00	APBD Kabupa ten	
4.406.41.01.0 3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kab, malang	12 OB	5.830.000,00	APBD Kabu paten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kab. malang	12 OB	5.830.000,00	APBD Kabupa ten	
4.406.41.01.0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	Kab. Walang	60 Jenis	28.767.735,00	APBD Kabu paten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kab. Malang	35 Jenis	28.767.735,00	APBD Kabupa ten	

	No.	CHIRACON STREET					34					
		disediakan (Jenis)					1	(Jenis)				
4.406.41.01.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	6 Jenis	3.543.122,00	APBD Kabu paten	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	6 Jenis	3.543.122,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.01.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kab. Malang	6 Jenis	3.559.227,00	APBD Kabu paten	Penyedisan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kab. Malang	6 Jenis	3.559.227,00	APBD Kabups ten
4.406.41.01.0 7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	Kab malang	2 Jenis	3.478.702,00	APBD Kabu paten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	Kab. malang	2 Jenis	3.478.702,00	APBO Kabupa ten
4.406.41.01.0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kab Malang	192 HOK	5.757.573,00	APBD Kabu paten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kab. Malang	168 HOK	5.757.573,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.01.0 9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kab. Malang	200 HOK	60,700,950,00	APBD Kabu paten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kab. Malang	30 HOK	40.700.950,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.01.1 D	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	200 HOK	64,589,504,00	APBD Kabu paten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab, Malang	190 HOK	64.589.504,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.01.1	Penyediaan Bahan Logistk Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	234 Jenis	4.480.000,00	APBD Kabu paten	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kabupate n Malang	6 Jenis	4.480.000,00	APBD Kabupa ten

4.406.41.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	42.490.448,00		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	62,490,448,00	
4 406.41.02.0 1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kab, Malang	5 Jenis	3,500,000,00	APBD Kabu paten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dadakan (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	3.500.000,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.02.0	Pemešharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kab. Malang	6 Unit	21.580.834,00	APBD Kabu paten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kab. Malang	8 Unit	21.580.834,00	APBD Kabupa ten
4,406.41.02.0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab Malang	3 Jenis	3.478.702,00	APBD Kabu paten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	3,478,702,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.02.0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	5,572,365,00	APBD Kabu paten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	25.572.365,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.02.0 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	8.358.547,00	APBD Kabu paten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	8.358.547,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	10.400.000,00		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	10.400.000,00	
4.406.41.03.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kab. Malang	15 Stel	5.600.000,00	APBD Kabu paten	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kab. Malang	15 Stel	5.600.000,00	APBD Kabupa ten

4.406.41.03.0	Pengadaan	Jumlah	Kab, Malang	16 Stel	4.800.000,00	APBD	36 Pengadaan	Jumlah	Kab.	15 Stel	4.800.000,00	APBD
2	Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	penyediaan Pakalan Olahraga/Bati k (Stel)	Nau, malang			Kabu paten	Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Malang			Kabupa ten
4.406.41.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	46.802.028,00		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	46.802.028,00	
4.406.41.04.0 1	Pendidikan dan Pelatihan Format	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Malang	15 Orang	46.802.028,00	APBD Kabu paten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Malang	15 Orang	46.802.028,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan , Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		0%	0,00		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		0%	0,00	
4.406.41.05.0	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kab. Malang	O Buku	0,00	APBD Kabu paten	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen leporan keuangan akhir (Buku)	Kab. Malang	0 Buku	0,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.05.0 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kab. Malang	0 Buku	0,00	APBD Kabu paten	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kab. Malang	0 Buku	0,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.06	PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIA N	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomia n		25%	820.000.000,00		PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	gren	25%	781.000.000,00	
4 406 41 06 0 1	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 Laporan	260.000.000,00	APBD Kabu paten	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 Laporan	241.000.000,00	APBD Kabupa ten

							21					
4.406.41.06.0 2	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab, Malang	2 Laporan	290.000.000,00	APBD Kabu paten	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 Laporan	290.000.000,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.06.0 3	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomia n dan BUMD	Kab. Malang	2 Laporan	270.000.000,00	APBD Kabu paten	Monitoring dan Evaluasi Pemanfsatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Keb. Malang	2 Laporan	250.000.000,00	APBD Kabupa ten
4.406.41.07	PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG	Pelaperan monitoring dan Evaluasi DBHCHT		100%	200.000.000,00		PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT		100%	200.000.000,00	
4.406.41.07.0 1	Kegiatan Pemantawan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan di Bidang Cukai	Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT	Bagian Perekonomia n	2 Laporan	200.000,000,00	OBH CHT	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan di Bidang Cukai	Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT	Bagian Perekono mian	2 Laporan	200,000,000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yaitu penyiapan bahan pelaporan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak menghimpun langsung usulan Program / Kegiatan Masyarakat, dan lebih sebagai suporting staff di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NT	V VV V	T	
		11	IHI	L	
					1194

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam:

- Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
- Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum;
- Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
- Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

- Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
- Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- Perluasan Lapangan Kerja;
- Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
- 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
- 6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
- 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
- 9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
- 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
- 11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta

Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;

- Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
- Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;
- 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
- Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
- Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan secara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

- Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
- 2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
- Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
- 4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
- Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
- Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
- Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
- Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
- Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);
- 10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
- Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
- Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
- Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur

dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Dacrah, kemudian pada tahun 2014 telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Dacrah. Pada dasarnya peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran, Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS baik laki-laki maupun perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati ke 2 (dua), yaitu meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran dari Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui fasilitasi pelayanan Administrasi Perekonomian.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2021 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program dengan 23 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3. Prgram Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Administrasi Bidang Perekonomian;
- Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang.

3.3.2. Kegiatan

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

- 8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
- 18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
- 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro;
- Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
- Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD;
- Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksnaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai.

Adapun kegiatan pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah sebagai kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan pada seluruh sumberdaya manusia/aparatur di Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang yang sampai saat ini jumlah perempuan adalah 6 orang (46,15%) dan jumlah laki-laki sebanyak 7 orang (53,84%).

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN MALANG

	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA	TAHUN 2021			PRAKIR	AAN MAJU TAHUN 2022
KODE	DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.496.162.856,00				1.501.852.028,00
4	FUNGSI PENUNJANG	URUSAN PEMERIN	ITAHAN		1.496.162.856,00				1.501.852.028,00
4.406	FUNGSI LAINNYA				1.496.162.856,00				1.501.852.028,00
4.406.41	BAGIAN ADMINISTRA	ASI PEREKONOMIAN	V.		1.496.162.856,00				1.501.852.028,00
4.406.41.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	395.470.380,00			100%	376.673.000,00
4.406.41.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kab. Malang	15 buah	1.159.567,00	APBD Kabupaten		120 buah	1,161,000,00
4.406.41.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	15 Ob	233,604,000,00	APBD Kabupatan		15 Ob	194.504.000,00
4.406.41.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kab, malang	12 OB	5.830.000,00	APBD Kabupaten		12 OB	5.836.000,00
4.406.41.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	35 Jenis	28.767.735,00	APBD Kabupaten		60 Jenis	28.797.000,00
4.406.41.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kab, Malang	6 Jenis	3.543.122,00	APBD Kabupaten		6 Jenis	3,547.000,00
4.406.41.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kab. Malang	6 Jenis	3,559,227,00	APBD Kabupaten		6 Jenis	3.563.000,00

4,406,41.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kab. malang	2 Jenis	3.478.702,00	APBD Kabupaten	2 Jenis	3.482.000,00
4.406.41.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kab. Malang	168 HOK	5.757.573,00	APBD Kabupaten	192 HOK	5.763.000,00
4.405.41.01.09	Rapal-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kab, Malang	30 HOK	40.700.950,00	APBD Kabupaten	200 HOK	60.782.000,00
4.406.41.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab Malang	190 HOK	64.589.504,00	APBD Kabupaten	200 HOK	64.654.000,00
4.406.41.01.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	6 Jenis	4.480.000,00	APBD Kabupaten	234 Jenis	4.484,000,00
4.406.41.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	62.490.448,00		100%	64.162.000,00
4.406.41.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kab, Malang	1 Jenis	3.500.000,00	APBD Kabupaten	5 Jenis	25.133.000.00
4.406.41.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kab. Malang	8 Unit	21.580.834,00	APBD Kabupaten	6 Unit	21.602.000,00
4.406.41.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	3.478.702,00	APBD Kabupatan	3 Jenis	3.482.000,00
4 406 41 02 04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	25.572.365,00	APBD Kabupaten	3 Jenis	5.578.000,00
4.406.41.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	8.358.547,00	APBD Kabupaten	3 Jenis	8.367.000,00

4.406.41.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	10.400.000,00		100%	10.415.000,00
4.406.41.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyedisan Pakaian Dinas (Stel)	Kab. Malang	15 Stel	5.600,000,00	APBD Kabupaten	15 Stel	5.610.000,00
4.406,41.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stell)	Kab. Malang	15 Stel	4.800.000,00	APBD Kabupaten	16 Stel	4.805.000.00
4.405.41.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	46.802.028,00		100%	46.802.028,00
4.406.41.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Malang	15 Orang	46.802.028,00	APBD Kabupaten	15 Orang	46.802.028,00
4.406.41.06	PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian		25%	781.000.000,00		25%	803.600.000,00
4.406.41.06.01	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 Laporan	241.000.000.00	APBD Kabupaten	2 Laporan	260,300,000,00
4.406.41.06.02	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 Laporan	290.000.000,00	APBD Kabupaten	2 Laporan	273 000 000 00
4.406.41.06.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	Z Laporan	250.000.000,00	APBD Kabupaten	2 Laporan	270.300.000,00
4.406.41.07	PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT		100%	200.000.000,00		100%	200,200,000,00
4.406.41.07.01	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT	Bagian Perekonomian	2 Laporan	200.000.000,00		2 Laporan	200.200.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang di tahun 2021 terdiri dari 6 Program dengan 23 kegiatan. Adapun Pendanaan Program dan kegiatan tersebut bersumber dari PAD dan 1 Program yang bersumber dari dana DBHCHT.

Program/Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang dan sumber dananya dapat dijelaskan pada tabel Berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang

		Zugan nummisti	asi Perekonomian S				
	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAH	UN 2021		
KODE	DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	PENTING
1	2	3	4	.5	6	7	8
					1.496.162.856,00		
4	FUNGSI PENUNJANG L	JRUSAN PEMERINTAH	AN		1.496.162.856,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				1,496,162,856,00		
4.406.41	BAGIAN ADMINISTRAS	PEREKONOMIAN			1.496.162.856,00		
4.406.41.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	395.470.380,00		
4.406.41.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kab. Malang	15 bush	1,159.567,00	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	15 Ob	233.604.000,00	APBO Kabupaten	
4.406.41.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kab. malang	12 OB	5.830.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	35 Jenis	28.767.735,00	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kab. Malang	6 Jenis	3.543.122,00	APBD Kabupaten	
4.406.41.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kab. Malang	6 Jenis	3.559.227,00	APBD Kabupaten	

4.406.41.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	Kab. malang	2 Jenis	3.478.702,00	APBD Kabupaten
4.406.41.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kab. Malang	168 HOK	5.757.573,00	APBD Kabupaten
4.406.41.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar deerah (HOK)	Kab. Malang	30 HOK	40.700.950,00	APBD Kabupaten
4.406.41.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	190 HOK	64.589.504,00	APBD Kabupaten
4.406.41.01.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	6 Jenis	4.480.000,00	APBD Kabupaten
4.406.41.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	62.490.448,00	
4.406.41.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	3.500.000,00	APBD Kabupaten
4.406.41.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kab. Malang	8 Unit	21.580.834,00	APBD Kabupaten
4.406.41.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	3.478.702,00	APBD Kabupaten
4.406.41.02.04	Perneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	25.572.365,00	APBD Kabupaten

4.406.41.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kab. Malang	3 Jenis	8,358.547,00	APBD Kabupaten
4.406.41.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	10.400.000,00	
4.406.41.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kab. Malang	15 Stel	5,600,000,00	APBD Kabupaten
4.406.41.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kab. Malang	15 Stel	4,800.000,00	APBD Kabupaten
4.406.41.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	46.802.028,00	
4.406.41.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kab. Malang	15 Orang	46.802.028,00	APBD Kabupaten
4.406.41.06	PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian		25%	781.000.000,00	
4.406.41.06.01	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 Laporan	241.000.000,00	APBD Kabupaten
4.406.41.06.02	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab, Malang	2 Laporan	290,000,000,00	APBD Kabupaten
4.406.41.06.03	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	2 Laporan	250,000,000,00	APBD Kabupaten
4.406.41.07	PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT		100%	200.000.000,00	

4.406.41.0	7.01 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT	Bagian Perekonomian	2 Laporan	200.000.000,00			
------------	---	---	---------------------	-----------	----------------	--	--	--

Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2021

			RENCANA TAHUN 2021					UN 2021	
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN		TARGET	The second secon				KEBUTUHAN	KETERANGAN
	PROGRAM / KEGIATAN	DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA	1	11	111	IV	DANAIPAGU INDIKATIF	
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								1.496.162.856,00	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN	PEMERINTAHAN						1,496,162,856,00	
4.406	FUNGSI LAINNYA							1.496,162.856,00	
4.406.41	BAGIAN ADMINISTRASI PEREK	ONOMIAN						1.496.162.856,00	
4.406.41.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	10	25	35	30	395.470.380,00	
406,41,01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	15 buah	10	25	35	30	1.159.567,00	
4.406.41.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	15 Ob	25	25	25	25	233.604.000,00	
406.41.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12.OB	25	25	25	25	5.830.000,00	
4.406.41,01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	35 Jenis	25	25	25	25	28.767.735,00	
4.406.41,01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	25	25	25	25	3.543.122,00	
4.406.41.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	25	25	25	25	3.559.227,00	
.406.41.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	25	25	25	25	3.478.702,00	
4.406.41.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	168 HOK	25	25	25	25	5.757.573,00	

4 406.41.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	30 HOK	25	25	25	25	40.700.950,00
406.41.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	190 HOK	25	25	25	25	64.589.504,00
406,41,01.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	6 Jenis	25	25	25	25	4.480.000,00
4.406.41.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	15	25	35	25	62.490.448,00
406.41.02.01	DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 Jenis	100	0	0	0	3.500.000,00
.406.41.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	15	25	35	25	21.580.834,00
406.41.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	50	0	50	0	3.478.702,00
406.41.02.04	Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	0	100	0	0	25.572.365,00
.406.41.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	25	25	25	25	8.358.547,00
4.406,41.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	50	50	0	0	10.400.000,00
406.41.03.01	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	15 Stel	0	100	0	0	5,600.000,00
4.406.41.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	15 Stel	100	0	0	0	4.800.000,00
4.406.41.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	10	10	70	10	46.802.028,00
.406.41.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 Orang	10	10	70	10	46.802.028,00
4.406.41.06	PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	25%	10	25	35	30	781.000.000,00
4.406.41.06.01	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 Laporan	10	25	35	30	241.000.000,00
4.406.41.06.02	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 Laporan	10	25	35	30	290.000.000,00

4.406,41,06.03	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 Laporan	10	25	35	30	250,000,000,00
4.406.41.07	PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT	100%	5	20	35	40	200.000.000,00
4.406.41.07.01	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT	2 Laporan	5	20	35	40	200.000.000.00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance. Komitmen tersebut akan menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat dikedepankan.

Pada Tahun 2021, Rencana Kerja ini terdiri dari 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan melalui mekanisme pengusulan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ANUSI

Lampiran

POHON KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA. KABUPATEN MALANG

INDIKATOR KINERJA

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Formula	
Tujuan:			
Meningkatkan kualitas sistem	tata kelola pemerintahan yang baik dan akur	ntabel	
Sasaran:			
	nggaraan Pemerintahan Daerah		
Program: Program Administrasi Bidang	Proportors Polyan Description	751 5 1 5 1 5 1 6 W	
Perekonomian	Presentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di	\sum Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan	- x100
	Bidang Perekonomian yang direkomendasikan	Σ Bahan Tindak Lanjut untuk untuk perumusan kebijakan	- X 100

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021 Nomor: 050/ /35.07.202/2020

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh satu yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematika Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Keempat: Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Kelima : Menyelaraskan program dan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan usulan kegiatan hasil kesepakatan pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Keenam: Melampirkan Pemetaan (mapping) nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
- Ketujuh : Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan melakukan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T.

Pembina Tingkat I NIP. 19661218 199303 1 006

Mengetahui;
RASI KEPALA BADAN PERENCANAAN
DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH

BADAL STREET NIAN PENBANSINIAN DESTAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19661126 199303 1 004

CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama PD : Bagian Administrasi Perekonomian

	2.200		- 8	ESESUAIAN	-	
NO	BAGIAN		Sesual	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	REKOMENDASI
1	PENDAHULUAN		3			
1.1	Later Belakang	Pengertian ringkas Renja	V			
		Proses penyusunan Renja	٧			
		Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra PD	V			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	٧			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	٧			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	V			
1.4	Sistematika Penulisan	Uralan pokok bahasan dan susunan garis besar isi RENIA sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017				
11	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu				_	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi peleksanaan Renje Tahun lalu (n-2) Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)				
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun- tahun sebelumnya dengan memperhatikan :				
		 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja; 	٧			
		 Realisasi program/keglatan yang memenuhi target kinerja; 	¥			
		3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	٧			
		Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan	٧			
		5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah	٧	- 8		
		6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	V			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD				
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	Tingkat kinerja pelayanan PD	- V			
-10	Fungsi PD	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelanggaraan tugas dan fungsi PD				
		Dampali terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	٧			
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	ý			
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	٧			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD dengan analis kebutuhan	Ŋ			
	10000000000000000000000000000000000000	Alasan dan catatan penting perbedaan	V			
2,5	Penelashan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2021 (yang dilaksanakan di Tahun 2020)	٧			

III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAER	RAH		
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	v	
3.2	Tujuan dan Sasaran Benja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	v	
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dan perkiraan Tahun 2022	٧	Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERAN	IGKAT DAERAH		
		Menguraikan tentang Rencana Kerja Tahun 2021 berdasarkan RKPD 2021 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	٧	
٧	PENUTUP	1.1		

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T.

Pembina Tingkat I NIP. 19661218 199303 1 006 Tim Verifikasi :

1.

ANIK SUGIANTI HIDAYAT, SB, M.SI

Pembina Tingkat ! NIP. 19690805 199803 2 008

2.___

HENI RETNOWATI, SE

Penata Tingkat I NIP. 19730328 199502 1 001

3.

ANGGANG SUMAKSONO, SE, M.Si

Anggangermakual

Penata Tingkat I NIP. 19700315 200604 1 011



NOMOR: 188.45/ 527 /KEP/35.07.013/2020 TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
 Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Pembangunan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
 Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

 Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

Memperhatikan: Surat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 050/5654/35.07.021/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun Renja pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah
 Kabupaten Malang tahun sebelumnya;
- menganalisis kinerja pelayanan kerja Bagian Administrasi
 Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- d. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana;

- f. menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja pada tahun berkenaan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 21 September 2020

BUPATI MALANG,

SANUSI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Kabupaten
 Malang;

 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;

Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 527/KEP/35.07.013/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang,
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
3.	Kelompok Kerja:	
	- Ketua	Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
	- Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; b. Staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (Resti Dian Ramadhani, SE., MM.).

BUPATI MALANG,

SANUSI

FORMAT PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 YAHUN 2019

				RENIA FOTAH	JN 2821								PCMM (Month	ANPERMENDAGR		FFUH 2021	in house				72		-
DECEMBER	KODE	UNUSAN	BOANS	PROCRUM	MINATOR	1,770	PAGUINDIKATE	GUNDER	SUB KEDIATAN	REGIATAN	REGIATAR	KEGATAN	PROGRAM	PROGRAM	YARGEY	PAGU NDIKATE (TIE)	UFUSAN	UNUSAN		90	900		100
	-	1	URLILION 4	KROLATAN		TARGET	55P3	- SANA		11	12	71	14.	15	98	13	19	- 11			10	_	21
-		FUNGS PONUSUANG URUSAN PONERNTAHAN					-																
	4.006		FUNDE LARGEON				-								4					-	-	-	-
GIAN HINESTRAN KEKONOHIAN TOA	4.404.41																		-	250.00		100	-
	1980			RECENSATIONS CANCELLES (TEP)	Lesian Tee ASH (22)	78	g/y278 791/8	260	Compensus teal des Trapaques Acies	James THP AGN (se)	Accepted and Supercorn Proteingthal counted	Area op ASA de TPT (d)	PROGRAM PORCESTANAN ENCHANS ENCHAN ENCHAN ENCHAN	Paracrove Perhayona haji din Turbrajes Ashirki	1 00	219.218 (00.00	SERVETAPAL BASHAS	ENGLISHED LEGISAN PENGLISHED LIGUSAN PENGLISHAWAY		e: .0	200	8	
	440841.81			PRIDORAM MELAYAHAN ADMHISTRASI DESKANTORAN	Presention powership operational pertantonin (K)																		
	4.408.41.81.01			Ponyednor Jaco Surat Mayerat	James registres surei massir, des sund fealur (hub)	10 bah	200,000,00	PAG	Penyadian Jasa Suel Merusik	Austrio registradi austrianasis dian ause koluur (overly	Penyedisan Assa Penunjang Univen Panaphtehen Dearth	Jumbels registered Scand market date sweet bottom (Skoff)	PROGRAM PENUNUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN KANUPATENKUEA	Personal Personal Operational Personal No.	10166	220,000.00	DARRAH DARRAH	UNSUR PENNAME URUSAN PENERBITAHAS		01 6	2.08	91	
	4.400.41.61.00			Ponyodase Java Administras Kouengas	James popular pengeleb nervestras kovangen (1961	15 (3)	228.604.600,00	PAD	Penyadisan Administrati Pateksonasm Tugas ASN	Ament pagainst parquiose edinariosesi lessangen (108)	Administració Nacionagos Percogos Disenso	Justién pejabat pergelois administrasi kasangan (OB)	PROGRAM PENUNIANG URUBAN PENERNYTAHAN GAERAH KANUPATHINGEA	Personalizati Personalizati Operational Personalizati (%)	1906	220.604.000,00	SEKRETARAT GARKAH	UNDUR MINIMANG UNUSAN PENETRIFAHAN	4	g1 £	2.08	12	
	4.405.41.61.03			Ponyedeer Jese Nationalism Karter	Jerskil-potagins Indicestras (CNI)	12:08	6.147,140,00	PAD	Penyadisan Jana Palayanan Unum Kama	Jumilio politigas liphershen KRN i	Penyadran Jala Penyadran Union Penyadrahan Deposi	Junioh petugos kaberathen (OE)	PROGRAM PENDADASO UPLIDAN PERENGATAHAN DADINAH KADUPATUHKOTA	Personana Personahan Operational Personahan (N)	1208	£147.140,0E	DESPETABLES DARRES	LINIUR PENUNUNNO UNUSAN PENUNUKAHAN		41 0	9 2.06	H	
	4.008.41.81.04			Proyedwar Alek Tulks Kenter	James, sini bata terdar yang disedakan (Jamis)	15 Jens	15,767,725,00	PAD	Prinyadiase Excelotor den Periorgispen Kentor	Jumph and hife sensor young sendence (Jorie)	Assessment Union Peranguel Oriente	Jurish est fulls familie pring shortherer (Jerric)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENUNJANG URUSAN PENUNJANAN SACITAH EAGUPAT DAKOTA	Parsonnese Parsonnese Operaniese Parkonnese (%)	15 Ares	15.767.736.60	BEKRETAKAN DAERAH	UNSUR PENLIKUANO UTERAN PENEMITAHAN	4	D1 0	2.06	R	
	4.408.41.61.05			Ponyedwor Bereng Celation don Ponggaschia	James Section (1980)	\$.000	2542 52200	PAD	Penyadian Berang Sebakan dan Panggandan	zunien-boreng selakse yang disedanan-perini	Administrated Umon Pennsylvet Decret	groupson-liveral cuspon-hand years-peaned	PROCEAM MEMBELIANS LINUSAS REMERATAHAN EAGRAH KASUPATENKOTA	Paracrate Paracrates Operatorel Perhantina (N)	6.5em	5543 122/00	SEKRETARIAT DAGRAH	UNSUR PENUNUANG URUSAN PENUNUTAHAN	4	01 0	1 20	706	
	4.406.4121.06			Penyedase Kungoren versitzi Liztik/Penerangan dengenen Kereui	Jumish Perspections transposess eleti-hot Bittle dan stellburik (Jimis)	E-lecis	2.589.297,00	PAD	Pérjedate Kampuren sessasi sessasi sessasi s Borqueen Kartos	Jumish Pedyadisen somponen alek alek fatirik den erektronik Unekal	Agree entraid Union Pensyglat Decret		PROGRAM PENUNTANG URUSAN PENDENTANAN	Personali Personali Operational Personal (K)	6.2400	2,509,537,56	SEKRETARIAT DACKAH	UMBUR PENUNCHUNG URUSAM PONEPRITAHIAN		of I	200	01	
	4.606.41.81.07			Penyedisan Rahan Backen dan Pensimen Penundang-Unterpen	Jurish's below because den perstures de saveng - undergen geng december (Jenst)	2.mis	347470200	PAD	Penyedisah Bahan Sacasa dan Persturan Peruncang- Undengan	Jumén behan bedrer dan pereturan jenuakang - undangan yang dasadakan (Jenda)	Autoristical Union Perangkat Decrah		PROGRAM PEMUNJANG UPUSAN PEMUNJANG UPUSAN PEMENDITAHAN DAERAN KABURATSHIKUTA	Personale Personale Operational Pedianomen (NJ	2.090	2,478,702,00	SOURCE AREAT DACKAM	UNIUM PENUNUNG UNIOAN PENERNITAHAN		01	01 3.50	9 95	
	4.400.41.01.08			Ponyadioor Makenon dan Mhumen	Jundah srekansel dan makumon tanton Proposel, Rapal, dan tamuyang doedassas (HCR)	160 HOK	#.490.000.00	PAD	Fermas Kirjungan Tana	Jurish makemen for sinumen harien Fegevel, Rapid, dan Jamu yang dan Sakor (HCM)	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Justini mekonen Operainumen	PROGRAM PENUNUANG URUSAH PEMENINTAHAN DARBAH KANUPATHINKUTA	Persentate Persentation Operational Persentation (%)	180 HOK	E 400.000.00	SEKKETARIAT CAERAH	PURIOR PERIORIANS URIZAN PERIORIANA		81	91 20	6 04	
	4.405.41.81.08			Rapel-Rapet Spootnest ten Sproutiest te bue Dearsh	Jurish pegawai novembli per appoor dros ha kar don'et (HCKC)	22 HOK	25700.050,00	PAG	Ponyulenggarsen Popul formibasi om Karcutori 20090	Authin pagewal maneratri portugistat drus de lust dosnah (HCH)		Josephan Gress Jacob Regions Jacob Region Jacob	PROCESM PENLINIANG LIPUSIANI PENNINGTAHAN OMERAH KAGEPATINEGTA	Personane Personana Operational Personana(S)	2311016	39, You (6) (6) (6)	SEKRETARIAT EABRAH	USBUR PEBUSURNG URUSAN PEREFERTAHAN	4	01	21 2.01	6 06	
	4 400,41,81,18			Repositional Recorders dan Konsulted in Datum County	Juriah proposa menceuta persepanan daga ka dabah danah proka	1101000	64.600-004.70	*10	Report Knowlead	Jumén pegawai memeruhi puropokan Jawas de Gawan Jawan (J-CH)	American Union	Jorish Deprival Invention Invention diese in deer deersh INDIO	PROSERM PONENTARIO LITURAN PONENTARIAN PONENTARIAN DARRAH KAREPATERIKOTA	Presentant Personahan Operational Presentant (N)	1150404	RE 500 504,00	BEKRETARIAT DOMESAN	DIBLIR FORUMANS ERISAN POPERNICAGEN		01	01 20	5 00	
	4.408.41.81.11			Penyedalah Bahan Logisk Hastor	Awah tanan injirtik kanta yang dandakan (HCK)	6 Jons	6:50:000:00	PMC	Partyudoen Sence Logistic Kontre	Aureum beden sight in contair pang a sedancan (HOH)	Aprilottes Union Peranglat Dooreh	Junean tetrare	PEMPENTANG UTURAN PEMPENTANG UTURAN	Preparties Preparation Operational Pediamoranifis	6.040	£16200000	DAERAH	ENSUR PERCHAMAN UNURAH PERCHETANAN			11 14		

4.004.01.22	PROGRAM PRINTELLAN BARRANA DAN PRINTELLAN APARAMIANA APARAMIANA	Presentate Persentation Service dan Presentation Persentation (NO								=				SEXPETARAT DADIGAD		4				
4405.41.52.51	Pargoden Paraletek Gedang Kuntor	Junior persisten gedung former yang distolori (Janta)	1.366)	3.000.000,00	PAD	Pargetten Derent den Processes Gedung Kantor abschleng men bernot	Junton pemilaban gortung kesator yang disdolarn (Jorda)	Pongations Sovery MRC County Possessing Unusual Possessidences Description	Justick poraboten gestung keréw yang dadakan (JoHH)	PROGRAM PENINLANG URUGAN PENERHTAKAN PENERHTAKAN PARENH KABUPATENBERTA	Personnes Person drom Operant and Personnes (N)	1 Jareis	3,600,000,00	BEKRETARIAY DAGRAM	UNSUR POMINUANO UNIDAN PERRINTAHAN	•	D1 0	20	,	10
4.466.41,02.02	Perceivation Subjection Subjection Clean/Correspond	Junior senderum rolle langed des femilieres rolle dus yang diselbera rulas des tembala (UNI)	Stat	15.500.034,00	PAD	Paryodison Jess Porodinomen, Herys Personnen der Paromegen Door sess Forderan Tares Jelette	Artists topicationals including and the sundersory rode cos yong dipolitisms ruths steventida (Crist)	Peopularin Sereng Mile Decrah Naturang Utukan Persentahan Debrah	Justich kondersen note enset das kondersen tode das yang dipalhera nuth die barkeis (UHR)	PROGRAM PENDANG UPUSAS PENDENTANAS DAESAH KAMUPATENNOTA	Proportion Personner Operational Personner(N)	ð Uridi.	10.000,034,00	SEKRETARAS DAERAH	UNDERT PENINDANG UNDAAN PENENDUKAHAN		D1 8	20	0 0	14
8.40%.41 SECO	Potrelitarian Ruth/Berkelo Protrejupen Gedung Nomie	Juntals perfenytrapes godung kenter yang dipatnore indinateritalia (James)	X-derits	3,478,702,00	PAD	Persollement Police Institut General G	Amin's pertongloper geologicantor yang dipolitera ratinbonasis (Jone)	Prongectown Denning Mills: Descript Provincial University Percentral Nation Descript	Jumbin gentengkapan genteng kentur yang dipolitikas yutrabansak (Jensa)	PROCESSE POINTAIN UNUSAN POINTAINAIN DADRAM KAROPATENINGTA	Perservane Persecution Operational Perservani(N)	S Jenis	3.418.702.00	SERVICTARIAT DAUTUH	UNIUR PENENJANG URBEAN PENENENTAHAN		gr 6	n 21	9 1	11
4.406.41.32.04	Senstration Software Coding Social	(prespectate (sweet) And degreese formation organization	3-Jeris	5.572.366,90	PAD	Percentament Fort addition Geologi Stanton Mari Sengueses Leinnye	Jurish geding karts ying Spelhers Retribersule (Jerhi)	Pengudoen Derong Milik Desnoh Penegang Urusan Penegangsahan Dasanan	Aumien godking Randor yets) dipolitions Historijankais (Jieria)	PROGRAM PEMBLIANG URUGAN PEMBLIANAHAN CAERAH KAMPATHANOTA	Persondens Persondens Operadens Persondens (N)	3 Janes	5,572,360,00	SEKRETARIAT DAERAH	UMBUR POWINIANG WEJSAN POWERBITAHUN		er e	1 24		00
4.6% 81.82.05	Purefrienzes Rath/Serkste Persisten Geding Keiler	Jurisch porsibles gedeng Pautor yeng dipelians In dishambala (Juris)	2 Jeris	6306.547,00	PAD	frynotterses/Ret spilled Service der Pressrane Gedang Kantor also Bonguren Lahanya	regularization (Jesus) Segradi exerce, Anali Segradi exerce, Anali Segradi exerce, Anali	Pengadase Senerg Milk Ossere Penasang Situes Persahalakan Dansa	jurien persisten gedung kerker yeriş dijelirans ruputanozala (Jeniz)	PROGRAM PENGHANANG URUSAS PENGRUTAHAN DAESAN KABUPATENHOTA	Persontate Forcenshan Operational Perhodosor(%)	1 iwas	4355547.08	BOUNETARIAN DAERAH	EMBUR PENUNUANG URUSAN PENERNITAHAN		01	11 20	15	10
+	Progedica Condition CleanCommitted	(June) sondaraet drausperestonal rock 2 best yang disdelam (Unit)	200	90,000,000,00	PAG	Forgadism Konferent Dress Openstonal steu Lepangen	jurish karutanian direntiperational code 2 bers plag disdoon (1995)	Pengsone Garang sets Geenst Penusjang Univer Penusintahan Docush	jurish bedorien descioensional rote 2 toro ying decision (1,14)	PROGRAM FENDALANG UNUKAN FENDALANG UNUKAN FENDALANAN DAERAH KABUPATENKOTA	Personalization Preservational Operational Packastoren (%)	2Unit	45,000,000,00	SEKRETARIAT GAERAH	INSUR PEXINUNG UNUSAN PEMERSTANAN		01	04.		
8.409.41.02	PROGRAM PENNOKATAN DISPUN APARATUE	Prosentate Petroling Kerja Aperatur (N)						3										1		
4.405.41.53.01	Pengeleer Palgries Cines (Maria Peringlister mye	Juriali Penyedeen Pelales Stati (Sel)	t5-lbsi	5800,000,00	PAG	Pangadison frances Diseas Separte Addod Retemplaparrays	Justidi, Presyndaus Palasan (Sant (Stol)	Arrestrati Kapagawalan Pecangkat Decrati	Jureen Penyediase Palatien Dines (Siel)	PROGRAM PENSHJANG URUSAN PENSHRATAHAN DASKAH KARUPATEN KOTA	Personalism Personalism Operational Personalisms (N)	19 Stell	5.900-000,00	SEKRETARIAT EAERAN	UNGUR DEMONSTRATE URUSAN PRIMERBITAHAN	•	01	91 10		ce
4.965.41.23.02	Peopolase Pelolas Physic Hel-Hel Terioliu	Junior peryecton posses destragations (30%)	15-164	4.800.000,00	PAG	Fengaduar: Festan Dirac Deserte Afrikal Kulongisponnya	Azekin penyedian poloniya skehniya helik (1009)	Administresi Kremponisteri Penergiat bersili	Jurish perspektus pukshin olshragu balik (dan)	PROGRAM PENDALANG URUSAN PENDRATAKAN DACKAN KUBUPATENAKSTA	Persenties Persentier Operations Perhantime (II)	15 3000	4.800.000.00	SCHRETARIAT DAMESH	DIGUES PERSONA PENERSITAHAN		81	er (u		05
4.800.61.34	PROGRAM PENNOGATAN KAPARTAS SIANGGO CAYA APARATUR	Probactico Fundadarion Kepasitis Popterei S Funnadari Dassin (K)																		
4,000,0104.D1	Prondstant dan Pelalitian Formali	Junior programs yang mosphat posether (Ceang)	15 Crang	10,802,028,08	PAG	Pendidister dan Patalitien Progone Bardoserken Tugon den Pinsel	Jurieds pagewoll story monghood poletikes (Chang)		Jumbers regioned years mengelaid pelodities (Oxang).	PROSEAM PROSEAM LEGISAN POMERNITAKAN DAGRAH KABUPATRAMOTA	Persentage Persentage Operational Perhantenee (%)	16 Grong	10.002.02830		URGUR PERUNUKNIG URUSAN PENERNTAHAN		#1	ar 20	95	69
4.09(41.96	RECORAN ADMINISTRAS SEANG PRIEKDHOMON	Phasestee peloponal pelokasi sim liabljaten di kidang peskonseries (NJ																		

1 t

	4,406,41,06		PERSONANI ADMINISTRATI SIDANG PERSONOMANI	Procentius polispenen prisinarean kelifikan di bidang prokonomien (%)																	Ш	
	4406.41.06.01		Micrototig der Endland Kipangs den Solder Under MACO	Presputes monitoring des evalued toperand dan usate micro	Symposis	110.000.000,00	PAD	Personnen dan Pengawasan Disposi Mirot Kedi	Pringeres maritaring des evalued imparted day upone milito	Eveland Position est Kaniphon Personomian	Prisposen soutoing des existed toperad des come retro	PROGRAM PREPIONOMENS CAN PENNANGUNAN	Presporati positiving der preduced logisteral den unerder states	2 Laponse	150,000,000,00	BENRETARIAT BAGRAH	UMBLIR MEHICH JAMS UFUSAR PORETHITAHAR	•	gt 03	201	93	
	uncas		Multiplier Embard Sugar Participation Six Participation	Pringeron neartheirg De- ministed States Periodoction des Periodoction	2 Lepane	to me on at	PAD	Programming day Districts Participanting	1. Polispones months/morbid montana Seator Profesional den Prompengen	Divisional Projectional National Province or first	1. Pringeren martinary del metasti Sector Perindustian Clin Perindustan Clin Peringanyan	PROGRAM PERFECHICAGNA DAM PENNANCINAN	C Presponent monitoring that modulate President President data President gas	Ziapore	19,000,000,00	DAERAH DAERAH	LINSUR PERLINIANS UPSTANA PERENGALANAN		8	201	20	
G.63-7:	4406,41,09,03		Montaring the Evaluation Personal International Internatio	Prepare tradeing des exists Personnels des Borres Personnels des BURD	2 Laporise	50,000,000,00	PAG	Roordness, Shelmorkeds, Merthanig des President Medipless Perspection SUMC des SLUO	Prosperse monthring den makest Personalen Serena Personalen den 51,040	Sinistraneau	Freignerer senduntig den restand Personnersen den Personnersen den St. Sell)	PROGRAM PENENGHOMENH DAN PENENGHOMEN	Poliporen mustoring-ten metaera Porentacian Service Poreconstan des SUNO	2 Lagoren	150,000,00600	SECTION OF	UNIOUR PINCHANG URLEAN PONEMINTANIA		G1 (3)	201	01	
	440641.07		PROCESSE SCIENTIAN DE SELANG CURAI	Proceedans scale hard latertype & Millerg solid (N)					bat .								TOUR THOUSE			2500	990	,
	440641.007.01		Registes Posteriores on Energy eres Participant Galeria Participant Relation University of Edward Calon		2 Laponia	200,000,000,000	DENE	T Dated	2. Amend beyond periodically date evoluted from provingeneral companies periodical evolutes periodical evolutes periodical evolutes periodical evolutes date date de construction de descrip- ciones	Control Passanian National Parameters	2 James Ingress maked dear partners par	PROGRAM PRESCONDENA DAR PRESANGURAN	2 April Sports ordered and ordered and ordered ordered ordered ordered ordered ordered	21	die one one on	BEKKE TARAT GAERAN	CANDE PERIMENE INCIDAN PERIMENANAN		*			

. . .

Mangarahi,
EIRELA INGGO A GORGO PERIEDO COMO S

B. EIRELAND SAMADO MAT

BOY 15061255 198781 2006

LEMBAR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021

		-	1	Hasil Pengendalian dan E	The second secon
No	Jenis Kegiatan	Kese	suaian	Palataneous	Tindak Lanjut
NO	Jenis Kegiatan	Ada	Tidak	Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Penyempurnaai Apabila Tidak Ada
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	٧			
2	Pengolahan data dan informasi.	٧			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
5	Penentuan Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	٧			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	v			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	٧			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	v			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	٧			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	٧			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	v			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	٧			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masingmasing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	v			

12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	v	
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	v	
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	v	

Kepanjen, 14 Januari 2021

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T

Pembina Mngkat I NIP. 19661218 199303 1 006